



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **93591**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.025.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/75 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/80 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 122.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2018, LAINNYA Rp. 25.000.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH XS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 21.750.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.700.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.170.950.000**

III. HUTANG **Rp. 495.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 675.950.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.